



Analisis Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Dalam Meningkatkan Kinerja Bagian Perencanaan Dan Keuangan Pada Kantor Walikota Medan

Seri Mulyani¹, Rahmat Daim Harahap²

Program Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Korespondensi Penulis : lubisserimulyani@gmail.com

***Abstract** This research aims to determine and understand the role of the Accounting Information System (AIS) in improving performance in the Planning and Finance section of the Medan Mayor's Office. The method used in this research is a qualitative descriptive method. The data collection techniques used in this research are through interviews, observations, and documentation. The results of this research show that the Accounting Information System (AIS) plays a very important role in helping Planning and Finance employees in preparing financial reports. Employees just need to input data into the system, then the process of classification, summarization until finally a financial report is formed is carried out automatically by the system.*

Keywords: System, Accounting Information System, Financial Reports.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam meningkatkan kinerja di bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Walikota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara (*interview*), pengamatan/observasi (*observation*), dan dokumentasi (*documentation*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sangat berperan membantu para pegawai bagian Perencanaan dan Keuangan dalam penyusunan laporan keuangan. Pegawai tinggal menginput data pada sistem, selanjutnya proses pengklasifikasian, pengikhtisaran hingga akhirnya terbentuk laporan keuangan dikerjakan secara otomatis oleh sistem.

Kata Kunci: Sistem, Sistem Informasi Akuntansi, Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi sekarang ini, perusahaan-perusahaan ataupun instansi pemerintahan sangat membutuhkannya. Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan perusahaan atau instansi pemerintahan adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dimana laporan keuangan dihasilkan dari proses input dan output yang baik.

Dengan kata lain kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi yang didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. Untuk itu bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksana anggaran harus sesuai dengan Undang-Undang yang diatur pada sertiap peraturan pemerintahan yang berlaku.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 391 tentang Pemerintahan Daerah yang wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah berupa informasi pembangunan daerah maupun informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu informasi. Undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan

Received September 30, 2023; Revised Oktober 2, 2023; Accepted November 07, 2023

* Seri Mulyani, lubisserimulyani@gmail.com

kepada publik melalui penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) mewajibkan Pemda untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Laporan keuangan merupakan bentuk wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dan merupakan tanggungjawab atas akuntansi publik menjadi salah satu ukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah, sehingga dampak strategis pada peran pengawasan dan juga peran setiap instansi dapat terlihat.

Informasi yang seluas-luasnya diberikan kepada publik dan pemegang saham, dengan memperhatikan peraturan. Laporan-laporan diterbitkan secara berkala dan tepat waktu, yang mencakup Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Semester, dan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit, serta Laporan Tahunan. Informasi juga diberikan melalui paparan publik, media cetak dan elektronik, serta forum investor. Sistem pengelolaan perusahaan selalu mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja organ perusahaan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang menggambarkan kinerja keuangan dari organisasi perangkat daerah dan pemerintah daerah secara keseluruhan dalam melaksanakan perencanaan yang telah diterapkan. Pemerintah daerah selaku pengelola dana harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Pada dasarnya laporan keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan penggunaannya dan bukan untuk mempersulit atau membingungkan pemangku kepentingan.

Laporan akuntansi pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut dibuat oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Di dalam Pasal 6, UU No. 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan sebagaimana dimaksud selanjutnya:

1. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam
2. kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
3. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna

4. Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
5. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk
6. mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
7. daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, selanjutnya melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
2. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola
3. keuangan daerah (PPKD); dan
4. Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, gubernur/bupati/ walikota mempunyai kewenangan:

- 1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.
- 2) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah.
- 3) menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang.
- 4) menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran.
- 5) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah.
- 6) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- 7) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah.
- 8) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Perubahan sistem politik, sosial, ekonomi dan kemasyarakatan yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik (*good government governance*). Tuntutan ini perlu dipenuhi dan didasari oleh para manajer Pemerintahan Daerah. Menurut PP No. 105 / 2000 yang diganti menjadi PP No. 58 / 2005 yaitu mensyaratkan perlu dilakukannya pertanggungjawaban dalam bentuk lapoaran keuangan (neraca daerah, laporan arus kas, dan realisasi anggaran) oleh kepala daerah.

Sehingga menuntut pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Kemampuan ini memerlukan informasi akuntansi sebagai salah satu dasar pentingnya dalam mengambil keputusan alokasi sumber daya secara ekonomis. Berdasarkan hal tersebut, disusunlah sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah ini dijalankan oleh bagian keuangan pemerintahan daerah.

Mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan maka diharapkan laporan keuangan pemerintahan akan dapat diperbandingkan, sehingga sangat berguna untuk penilaian kinerja pemerintah daerah. Setiap unit kerja menentukan target dan tujuan serta merefleksikannya ke dalam suatu performance plan yang memberikan informasi mengenai jenis layanan yang disediakan, cara menyediakan layanan, objek pemakai layanan, kualitas layanan yang diharapkan, dan tindakan yang diperlukan dalam menyediakan layanan.

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di Perusahaan atau instansi dapat membantu fungsi-fungsi manajemen dalam menjalankan tugasnya. Salah satu cara agar fungsi-fungsi manajemen tersebut dapat tercapai adalah dengan menerapkan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi menjadi faktor penting dalam membangun performa organisasi melalui pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan data finansial dan akuntansi untuk dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan, kualitas dari informasi akuntansi, evaluasi performa, pengendalian internal dan memfasilitasi transaksi perusahaan. Melalui informasi data finansial dan akuntansi yang akurat, maka dapat diketahui secara pasti keadaan perusahaan, sehingga perencanaan perusahaan di masa mendatang lebih mudah disusun.

Selain membantu fungsi-fungsi manajemen Sistem Informasi Akuntansi (SIA) juga membantu dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan atau instansi pemerintahan. Dimana laporan keuangan yang dihasilkan melalui suatu proses input dan output yang baik agar mendapat sistem pelaporan keuangan yang maksimal.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu sistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas penyediaan informasi keuangan guna membantu manajemen dalam pembuatan keputusan. Setiap manajemen dalam sebuah organisasi memerlukan informasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, tanggung jawab, dan wewenang yang dimilikinya. Sistem informasi akuntansi melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengguna.

Dengan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang aplikatif, lengkap, dan tepat akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas, tentunya ada penggerak yang menjalankan Sistem Informasi Akuntansi (SIA),

khususnya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sistemnya dapat berjalan dengan benar dan tanpa kesalahan. Tanda adanya sumber daya manusia, kerangka data pembukuan tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Adapun hubungan antara Sistem Informasi Akuntansi (SIA), pelaksanaan pekerja, dan laporan keuangan sangat penting dan saling dibutuhkan. Karena suatu organisasi atau instansi mengharuskan masing-masing dari ketiganya membantu dalam pembuatan laporan keuangan agar berjalan dengan baik dan juga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Permasalahan pada Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk memperkuat keputusan. Sehingga penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak baik maka akan menyebabkan kualitas laporan keuangan daerah juga tidak baik.

Dengan masih banyaknya temuan yang berdasarkan kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam meningkatkan kinerja bagian Perencanaan dan Keuangan Kantor Walikota Medan?
2. Apakah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berpengaruh besar terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakannya untuk mendukung operasi dan manajemen. Selain itu sistem informasi juga digunakan pada kegiatan pengelolaan keuangan perusahaan atau instansi pemerintahan untuk membantu menyediaakn informasi yang diperlukan. Sistem informasi menurut Leitch dan Davis dalam minarni adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan bagi pihak luar tertentu berupa laporan- laporan yang diperlukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan pengguna teknologi untuk mendukung

manajemen dan kegiatan suatu operasional.

B. Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Menurut Nugroho Widjajanto (2001) sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sistem informasi berbasis komputerisasi yang mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan.

Sistem pengolahan yang baik adalah system yang terstruktur dan terdiri dari prosedur, metode, teknik atau cara yang memungkinkan terlibatnya manusia sebagai penunjang tercapainya tujuan.

Sedangkan menurut Ardana dan Hendro Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, dan memproses data keuangan dan data non keuangan yang terkait dengan transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan.

Tata sutabri (2004:6) mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumberdaya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan, sistem informasi akuntansi harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan transaksi dari data lain dan memasukkannya ke dalam sistem
- b. Memproses data transaksi
- c. Menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang.
- d. Menghasilkan informasi yang diperlukan dengan membuat laporan atau memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri data yang tersimpan di komputer.
- e. Mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah proses pengumpulan, pencatatan, penggolongan, memproses data atau transaksi perusahaan sehingga menjadi informasi laporan keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

C. Laporan Keuangan

PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (revisi 2009) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah informasi yang sangat penting dalam

menilai kegiatan perusahaan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai perkembangan yang dilakukan perusahaan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai prestasi yang dilakukan perusahaan pada saat masa lampau, sekarang dan rencana pada masa mendatang. Menurut Mardiasmo (2009) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Laporan keuangan merupakan seperangkat laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Neraca (Balance Sheet) adalah suatu yang menggambarkan posisi keuangan dari satu kesatuan usaha yang merupakan keseimbangan antara aktiva, utang dan modal pada periode tertentu.
- b. Laporan Laba Rugi adalah hasil dari seluruh pendapatan dan beban dari satu kesatuan usaha pada periode tertentu.
- c. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan perubahan modal dari satu kesatuan usaha selama satu periode tertentu, yang meliputi laba komprehensif, investasi dan distribusi dari dan kepada pemilik perusahaan.
- d. Laporan Arus Kas adalah suatu penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan dari satu kesatuan usaha selama periode tertentu.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan adalah informasi yang tidak dapat diungkapkan dalam keempat laporan keuangan di atas, yang mengungkapkan seluruh prinsip, prosedur, metode, dan teknik yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan dokumen perusahaan yang digunakan perusahaan untuk melaporkan hasil aktivitasnya kepada semua pihak yang berkepentingan, biasanya meliputi, manajer, investor, dan kreditor (Yadiati, W. dan Mubarak, 2016).

Sedangkan (Susiana dan Arleen Herawaty, 2017) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang memuat informasi-informasi dan memberikan keterangan-keterangan mengenai data ekonomi perusahaan yang terdiri dari daftar-daftar yang menunjukkan posisi keuangan dan hasil kegiatan perusahaan untuk satu periode tertentu yang meliputi laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan keuangan. Tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi perusahaan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi yang menggunakan dalam pengambilan keputusan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk menjelaskan data sesuai dengan

hasil penelitian yang dijabarkan melalui tulisan atau gambar dan bukan angka-angka sesuai dengan temuan peneliti.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara kepada salah satu informan kunci pada bagian Perencanaan dan Keuangan di Kantor Walikota Medan serta dokumen/arsip SKPD berupa gambaran umum, struktur organisasi dan *job description*. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada informan yaitu Plt. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan . Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan, literatur, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara (*interview*), pengamatan/observasi (*observation*), dan dokumentasi (*documentation*).

PEMBAHASAN

Peran Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam Meningkatkan Kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Kantor Walikota Medan

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di bagian Perencanaan dan Keuangan sangat membantu dalam meningkatkan kinerja bagian Perencanaan dan Keuangan. Dimana agar transparansi dan akuntabilitas sektor publik dapat dilaksanakan maka diperlukan sistem akuntansi yang memadai, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparansi, adil, efektif dan efisien. Pengembangan sistem yang dianggap tepat untuk dapat di implementasikan di daerah menghasilkan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang diharapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai.

Adapun fungsi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan anggaran biaya, yaitu:

- 1.Membantu dalam penyediaan informasi biaya yang menjadi alat perbandingan antara anggaran dan realisasi biaya.
2. Mengetahui tingkat pencapaian target, apakah sesuai dengan yang dianggarkan.
- 3.Membantu pemilihan alternatif yang terbaik dan alternatif yang tersedia serta menganalisis alternatif yang dipilih yang dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil manajemen.

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Dihasilkan

Adapun manfaat penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terhadap laporan keuangan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintahan melalui penyusunan dan pengembangan sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Sebagaimana pemerintahan daerah lainnya di Indonesia, Pemerintahan Daerah Kota Medan telah mengimplementasikan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan menciptakan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan publik. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda), salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji serta disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berterima secara umum yaitu dengan menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Namun akuntabilitas dan transparansi publik juga melekat pada fungsi pengendalian dan pengawasan, maka informasi yang disajikan terutama aspek pelaporan keuangan kepada publik harus *auditable* atau dapat diaudit oleh baik aparat internal dan eksternal pengawasan fungsional Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) maupun auditor lainnya yang terkait.

KESIMPULAN

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memiliki peranan penting pada bagian Perencanaan dan Keuangan di Kantor Walikota Medan dimana memudahkan proses penyusunan laporan keuangan, pegawai tinggal mencatat/menginput data pada sistem, selanjutnya proses pengklasifikasian, pengikhtisaran hingga akhirnya terbentuk laporan keuangan dikerjakan secara otomatis oleh sistem. Hasil output dari sistem informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang merupakan gambaran keadaan perusahaan dapat dijadikan alat ukur dalam pengambilan keputusan anggaran biaya karena informasi akuntansi yang dihasilkan lebih akurat, tepat waktu, dan relevan. Dengan adanya Sistem Informasi Keuangan (SIA) laporan keuangan yang dihasilkan juga lebih akuntabilitas dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzim, Faidul. (2017). *Peranan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Alat Bantu Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Biaya Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)*. Kota Makassar. Jurnal Perspektif.
- Budiriyanto, Eko. (2018) *Kajian Legal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)*. *Djpk.kemenkeu.go.id*.
- Dewi, K. Chandra, dkk. (2018). *Analisis Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Badan Usaha Milik Desa Mandala Giri Amertha Desa Tajun)*. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha.
- Fahri, Zukhruf, Juliana Nasution. (2021). *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Di Bagian Umum Kantor Walikota Medan*. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA). Medan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Subetti, Veti, dkk. (2020). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara)*. *Repository.umpalopo.ac.id*.
- Riyanti, Indah. (2018). *Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas*. *Repository.unsri.ac.id*.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.